

# Menata Banjir Manusia Masuk Kota

## Pengantar

Tanpa menyiapkan bendungan, arus manusia Indonesia, seperti halnya di banyak negara Dunia Ketiga, akan terkonsentrasi di kota-kota metropolitan. Desa mereka semakin tidak memberi rezeki yang seimbang dengan kota. Namun, bila ini dibiarkan terjadi, dikhawatirkan kesenjangan antara desa dan kota akan semakin tajam. Tidak hanya itu. Perbandingan antara jumlah penduduk kota dengan fasilitas pelayanan yang bisa disediakan setiap kota pun akan lebih timpang lagi. Apalagi kalau kita tidak sadar akan hirarki perkembangan kota, yang menurut Soenarjo Danoedjo, Direktur Jendral Cipta Karya Departemen PU, cenderung berkembang dengan sendirinya mengikuti arus barang dan jasa mulai dari tingkat rumah tangga dan desa sampai ke kota orde satu. Demikianlah misalnya, meskipun Kupang merupakan ibukota propinsi NTT, namun masih termasuk kota orde ketiga, karena dalam arus barang dan jaringan transportasinya masih berorientasi kepada kota orde kesatu Surabaya.

Untuk mencegah kota Surabaya, Jakarta, Bandung dan beberapa kota besar lainnya agar tidak terus mekar berkembang melampaui daya-tampungnya hingga menjadi megapolis yang tidak nyaman lagi dihuni manusia, agaknya perlu ditumbuhkan kota-kota lain

dan kawasan pengembangan di sekitar kota orde pertama tersebut. Misalnya, dengan menumbuhkan Bogor, Tangerang dan Bekasi di sekitar Jakarta Raya, atau menunjang pertumbuhan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo dan Lamongan di sekitar Surabaya. Namun itupun belum cukup, sebab dalam tahap lebih lanjut, kata Hariri Hadi, Deputy Perencanaan Regional BAPPENAS, masih perlu terus dikembangkan kota-kota kecil tingkat kecamatan, agar penduduk desa yang ingin lari ke kota besar lebih dulu terjerat di kota kecamatan tadi. Jeratan itu dimaksudkan untuk mengurangi tekanan akan penyediaan fasilitas pelayanan kota yang dirasakan semakin mahal dan berat di pundak pemerintah kotamadya.

Menurut Daeng Patomppo, bekas Walikota Kotamadya Ujung Pandang, fasilitas pelayanan kota seperti gedung sekolah, jaringan air bersih, perumahan, dan sebagainya sebenarnya bisa saja dipikul dan dibayar sendiri oleh warga kota, apabila pemerintah kota cukup bijak mengelola kota sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat setempat. Masih banyak lagi aspek-aspek permasalahan kota ini yang belum kita ketahui, untuk mana dialog dengan ketiga tokoh ini akan memperkaya wawasan kita dalam menelusuri masalah pokok dan jalan keluar yang optimal di kemudian hari.

Redaksi

## Kota Kecamatan Bisa Bendung Serbuan ke Kota Besar

Hariri Hadi, Deputy Pengembangan Daerah, BAPPENAS

Perkembangan terakhir memperlihatkan, bahwa sektor pedesaan sudah tidak mampu lagi menampung pertambahan penduduk, se-

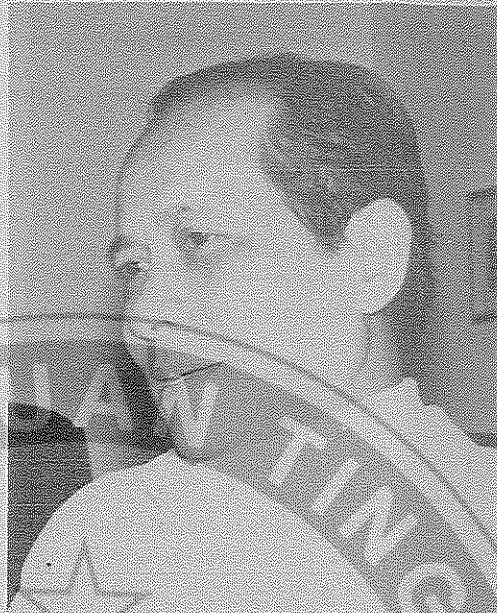
hingga terjadi perpindahan tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan dalam jumlah besar. Arus tenaga kerja ini semakin terpenggil ke

kota yang berkembang dengan segala fasilitasnya. Namun di kota-kota manapun juga yang padat penduduknya di dunia ini selalu mengakibatkan munculnya masalah-masalah sosial, politik dan ekonomi yang semakin tajam. Termasuk di antaranya kejahatan.

Menghindari hal itu, perkembangan kota harus dikekang. Jakarta misalnya, tidak akan dibiarkan berkembang sebagai satu unit kota, tetapi akan dikaitkan dengan kota-kota di sekitarnya yakni Bekasi, Tangerang dan Bogor (Botabek). Dalam pengekanan ini diusahakan agar kota-kota di Indonesia tidak akan sepadat kota Jakarta. Sebab menurut perkiraan, penduduk Ibukota, termasuk di antaranya Bogor, Tangerang dan Bekasi bila dibiarkan, berkembang dengan sendirinya akan mencapai 30 juta jiwa pada tahun 2.000. Tetapi, setelah mengalami pengekanan, jumlah itu hanya akan mencapai 23 juta jiwa di mana Jakarta sendiri dipenuhi oleh sekitar 12 juta jiwa, dan sisanya yang 11 juta lagi tersebar di Bogor, Tangerang dan Bekasi.

Jakarta dalam pengembangan wilayahnya ke Tangerang, Bogor dan Bekasi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Sekarang ini sedang dipersiapkan pula Keputusan Presiden yang baru untuk mengusahakan pengekanan perkembangan penduduk di kota ini. Pada waktunya, dengan pemikiran yang sama terhadap Jakarta akan dilakukan pula terhadap kota-kota lain. Sampai sekarang ini, konsep pengembangan yang sudah agak jelas adalah untuk kota Surabaya. Direncanakan pengembangan untuk Surabaya akan dikaitkan dengan kota-kota lain dalam pola Gerbangkertosusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo serta Lamongan). Pola pengembangan lain yang sudah agak jelas adalah Bandung dengan konsep Bandung Raya. Sedangkan yang belum jelas arah pengembangannya adalah Medan dan Ujung Pandang.

Pada tahun 2.000 nanti diperkirakan penduduk kota di Jawa sudah akan mencapai 80 juta orang. Jakarta dalam pola Jabotabek sendiri akan dikekang perkembangannya agar tidak melebihi 23 juta jiwa. Selebihnya sekitar 57 juta jiwa akan tersebar di kota-kota lainnya. Karena itu, penataan kota-kota kecil yang akan "diserbu" penduduk ini sudah harus dipersiapkan.



HARIRI HADI

Kota-kota di pulau Jawa memang akan mengalami tekanan besar dari urbanisasi, sementara di luar Jawa masalah kependudukan ini bukan persoalan yang sulit untuk diatasi. Di luar Jawa masih banyak kita temui *rural area* yang tidak sepadat dan semiskin di Jawa. Potensi di luar Jawa masih besar. Cuma yang menjadi masalah adalah daya dukung tenaga kerja. Untuk itu diharapkan peran daripada transmigran agar potensi ekonomi yang ada di sana dapat digali.

Perpindahan puluhan juta penduduk dari pulau Jawa ke pulau-pulau lain sebenarnya akan sangat menguntungkan semua pihak, karena hal itu akan dapat mengurangi tekanan penduduk di daerah perkotaan di Jawa, dan membuka lahan baru untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di luar Jawa. Masalahnya, perpindahan penduduk itu belum bisa berjalan lancar. Dalam Pelita III kita baru berhasil memindahkan sekitar 0,5 juta Kepala Keluarga atau sekitar 2,5 juta jiwa. Dalam Pelita IV ini diharapkan pemindahan penduduk akan mencapai 700 ribu Kepala Keluarga, atau sekitar 3,5 juta jiwa. Namun perkiraan itu masih di atas kertas. Sebab, di dalam perhitungan harus pula dimasukkan bahwa dengan berbagai alasan sebagian dari mereka ada yang kembali ke tempat asal. Namun mudah-mudahan,

dengan berhasilnya penduduk di luar Jawa tidak akan melakukan perpindahan ke Jawa.

Kini penduduk Indonesia bermukim di sekitar 3 ribu buah kecamatan. Melihat perkembangannya dewasa ini, ada sekitar 2 ribu buah kecamatan yang perlu penanganan segera dan serius. Keduaribu kecamatan ini terdapat di Jawa. Penanganan segera dan serius ini adalah karena selama ini penataan kecamatan selalu diabaikan. Pengabaian ini mungkin karena masalah-masalah yang ada di sana tidak rumit, tetapi sederhana, dan lahannya pun tidak luas, sehingga ada kecenderungan membiarkan kecamatan-kecamatan ini berkembang tanpa rencana.

Perencanaan di tingkat Kecamatan biasanya dilakukan apabila sudah berkembang jauh dan penduduknya sendiri sudah menjadi padat. Di masa datang, untuk menghindari hal ini terulang, akan dilakukan penataan ruang yang lebih sempurna di tingkat kecamatan, walaupun penataan atau perencanaan ini belum sempurna seperti halnya rencana penataan dan pengembangan sebuah kota besar. Hanya saja, dengan rencana kasar seperti itu penguasa setempat, yaitu camat bersangkutan, sudah mempunyai arah pengembangan di wilayah kekuasaannya. Misalnya di mana lokasi untuk perumahan, industri, perkantoran, pertanian, bioskop dan sebagainya. Perencanaan seperti itu tidak akan sulit dilakukan di tingkat kecamatan. Dengan tambahan pengetahuan mengenai penataan ruang, seorang tamatan Sekolah Menengah Atas diharapkan sudah akan mampu menyusun rencana pengembangan kota yang dimaksud. Biayanya pun tidak akan mahal. Mungkin setiap Pemerintah Tingkat II akan mampu menanggulangi beban biaya rencana penataan ruang di tingkat kecamatan itu.

Bila pengembangan kota ini dikaitkan dengan industri bidang pertanian seperti yang ditetapkan dalam Pelita IV, maka sangat diharapkan penggalakkan bidang industri bidang pertanian ini terjadi di kota-kota kecil, di kecamatan yang dekat dengan desa produksi. Kota-kota besar hanyalah sebagai daerah pengolahan hasil-hasil pertanian. Untuk itu diharapkan industri di bidang pertanian ini tidak saja sederhana dalam teknologi tetapi juga kecil dalam pemakaian modal. Bila ini dapat dicapai,

lapangan-lapangan kerja baru akan terbuka. Dengan konsepsi mengembangkan kota-kota kecil, sambil mengekang makin besarnya kota-kota yang sudah besar memang diharapkan kota tingkat kecamatan akan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Dengan terbukanya lapangan kerja baru di tingkat kecamatan para pencari kerja tidak lagi langsung menyerbu kota besar, tetapi lebih dulu terjaring di tingkat kecamatan.

Perpindahan penduduk dari desa ke kota memang sulit dicegah apabila daerah pedesaan tidak segera dibenahi. Kota kecamatan merupakan salah satu daerah yang perlu ditata untuk mencegah derasnya arus penduduk dari desa langsung ke kota-kota besar. Hal yang serupa juga dapat dilakukan dalam mencegah perpindahan antar pulau. Tekanan penduduk dewasa ini terasa sekali di pulau Jawa. Transmigrasi bukan merupakan satu-satunya alternatif untuk mengurangi tekanan penduduk di pulau Jawa ini. Kita memang tidak dapat membatasi keluar masuknya orang ke pulau Jawa. Yang perlu dilakukan adalah membangun bidang usaha di luar Jawa, sehingga orang akan tertarik mencari kerja di luar Jawa. Lapangan kerja yang tersedia di luar Jawa iupun nantinya akan dapat menahan minat orang untuk pindah ke Jawa.

Selain transmigrasi dan membangun industri di luar Jawa, yang perlu dilakukan dalam mengurangi tekanan penduduk di Jawa adalah mengembangkan bidang-bidang lain. Misalnya prasarana. Sebab pemilik modal tidak akan tertarik untuk membuka pabrik atau pertanian dan sebagainya apabila prasarana yang tersedia tidak memadai. Karena itu pembangunan prasarana menjadi penting. Termasuk di antaranya jalan, air bersih, pelabuhan, telepon, telex, televisi dan sebagainya, sehingga kota-kota di luar Jawa tidak kekurangan fasilitas bila dibandingkan dengan kota-kota yang ada di Jawa. Medan tercatat sebagai kota berbintang lima. Di sana ada telepon otomatis dan sebagainya, sehingga orang tidak akan melihat perbedaan menyolok antara kota-kota Medan, Padang, dan Bukit Tinggi dengan kota-kota lainnya di Jawa. Bila fasilitas-fasilitas seperti ini terpenuhi kemungkinan besar para pegawai yang dipindahkan ke daerah malah merasa senang, karena berbagai kebutuhan mereka

bisa diperoleh dengan biaya lebih murah bila dibandingkan dengan di Jakarta atau di kota-kota besar di Jawa pada umumnya.

Berpikir ke arah sana, yang masih dalam kesulitan adalah masalah angkutan laut. Pemerintah memang sudah mengatur lebih baik hubungan di laut ini, seperti dengan pelayaran Perintis untuk daerah-daerah yang jauh dilakukan. Tapi itu pun masih perlu dikembangkan terutama daerah-daerah seperti Maluku dan Irian Jaya. Tanpa hubungan laut daerah ini akan mengalami kesulitan. Namun yang menjadi masalah untuk Maluku adalah karena daerah yang luas ini hanya dihuni oleh 3 juta penduduk. Ini pun tersebar dalam beberapa pulau, sehingga penduduk per pulau sangat sedikit dan pelayaran ke sana menjadi tidak menguntungkan. Memang untuk membuka pelayaran rutin perlu dilihat juga hasil di lokasi yang hendak disinggahi kapal. Hal yang serupa juga menjadi masalah untuk Irian Jaya. Penduduk di sini hanya 1 juta orang. Padahal pulau ini cukup besar. Karena itu, pelayaran-pelayaran ke sini harus disubsidi. Kalau tidak begitu, tidak ada kapal yang ingin singgah ke sana, baik kapal barang atau pun kapal penumpang. Bila ini terjadi, daerah ini akan terisolir, atau terputus sama sekali dengan dunia luar. Walaupun Irian memang sebuah daerah yang sukar dikembangkan karena keadaan alamnya yang bergunung-gunung, dan tingkat kebudayaannya rendah. Jadi masalah utama di sana adalah masalah sosial. Perhatian lebih besar pada kebudayaan. Tanpa itu kebijaksanaan pembangunan ekonomi dikhawatirkan tidak dinikmati oleh orang-orang Irian sendiri.

Kini Bappenas menetapkan 4 buah pintu gerbang wilayah, yakni Medan, Jakarta, Surabaya dan Ujung Pandang, yang sekaligus menjadi gerbang internasional. Dalam 4 wilayah pengembangan ini, propinsi-propinsi yang tergabung di dalamnya akan mengadakan pertemuan tahunan untuk membicarakan kepentingan bersama. Pola pengembangan wilayah ini lebih mengutamakan potensi dan hubungan ekonomi, artinya melihat hubungan ekonomi satu daerah dengan daerah lainnya, atau daerah asal dan daerah tujuan barang. Dalam perencanaan kegiatan ekonomi ini batas-batas administratif propinsi mungkin diabaikan, walaupun batas-batas

hukum tidak bisa dilupakan. Misalnya, Halmahera dan Ternate dalam pengembangan dan perencanaan ekonomi memotong batas wilayahnya dan melakukan perdagangan atau kegiatan ekonomi dengan Manado. Tetapi Halmahera dan Ternate tetap dalam batas hukum Maluku. Begitu pula Nusa Tenggara Barat dan Bali yang erat kaitan perdagangannya dengan Surabaya termasuk dalam wilayah pengembangan Surabaya.

Namun wilayah pengembangan utama ini tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi. Diharapkan wilayah pengembangan impun dapat dihayati oleh setiap departemen. Misalnya untuk Departemen Kesehatan di wilayah ini membangun rumah sakit dari kelas yang terbaik supaya orang dari daerah-daerah lain di dalam wilayah pengembangan ini tidak perlu datang ke Jakarta untuk memperoleh fasilitas pengobatan yang terbaik. Cukup di kota-kota yang menjadi pusat wilayah pengembangan. Hal yang serupa juga diharapkan dari departemen lain.

Memang yang menjadi tujuan pembangunan adalah pemerataan. Merata fasilitas-fasilitas. Bukan dari tingkat hidup. Berdasarkan itu dicoba mengidentifikasi pemerataan dari segi luas wilayah sehingga bisa menciptakan satu unit wilayah yang kompak. Untuk itu bagi setiap wilayah dicari titik pusat wilayah dengan ketentuan tidak terlalu jauh dengan daerah-daerah di dalam wilayahnya. Misalnya cukup dengan jarak terbang selama satu jam. Melihat persyaratan seperti itu sebenarnya untuk Indonesia terbagi dalam 15 wilayah pengembangan. Itu yang ideal agar tidak terjadi Irian yang terlalu besar atau Bengkulu yang terlalu kecil. Ini tidak adil.

Yang sekarang ditempuh dalam pengembangan wilayah merupakan usaha menuju ke satu bentuk ideal. Karena itu, sebelum ditetapkan ada 4 wilayah pengembangan seperti sekarang, diperkirakan ada enam buah wilayah pengembangan, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Ambon. Namun karena berbagai persyaratan atau ukuran yang digunakan untuk menentukan pusat pengembangan wilayah tidak terpenuhi, maka Palembang dan Ambon tidak terpilih sebagai pusat pengembangan wilayah.

Namun pola wilayah pengembangan ini berubah sesuai dengan perkembangan wila-

yah yang bersangkutan. Sebab bisa saja terjadi, ini dalam perkiraan jangka panjang, jumlah penduduk di Jawa menyusut, dan mereka "menyerbu" Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau-pulau lainnya. Gambaran seperti itu sekarang sudah mulai nampak. Di Kalimantan misalnya, *real estate* berkembang sangat pesat. Medan sendiri seakan sudah seperti bagian dari Malaysia.

Dalam mengendalikan perkembangan penduduk yang jumlahnya terus meningkat ini sebenarnya dapat ditempuh juga dengan membangun kota yang mengemban fungsi-fungsi khusus. Kita memang akan menuju ke pengendalian penduduk dengan pengembangan kota-kota seperti itu. Misalnya, kota yang khusus dibangun untuk perindustrian, perdagangan, pendidikan dan sebagainya. Mungkin juga kota itu akan merupakan kota yang mengemban kombinasi dari dua buah fungsi yang saling menunjang seperti pendidikan dengan industri, pendidikan dengan peternakan, perkebunan dengan administrasi dan sebagainya. Sebagai contoh, Yogyakarta yang sudah terkenal sebagai kota pendidikan sebaiknya tidak lagi memikul fungsi sebagai kota industri besar. Cukup dengan industri kerajinan. Ini sudah memadai untuk Yogyakarta. Contoh lain, Sukabumi. Kota ini sebaiknya menjadi kota pertanian dan perkebunan seperti yang dilakukan sejak zaman Belanda.

Dengan pola berpikir seperti itu, pengembangan pendidikan di satu kota pun sebaiknya disesuaikan dengan potensi daerah yang bersangkutan. Di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur misalnya sebaiknya didirikan sekolah-sekolah peternakan, sehingga mereka yang ingin mendalami masalah peternakan dapat dikirim ke sana.

Dengan pembagian fungsi dan tugas seperti ini, dapat dikatakan untuk hal-hal lain kota tersebut tertutup secara administratif.

Lantas dengan perencanaan yang baik kita kembangkan kota-kota lain. Misalnya, Jakarta tertutup untuk industri dan Jakarta tidak lagi mengeluarkan izin pendirian industri. Izin mendirikan industri dialihkan ke kota-kota lainnya, seperti Bandung, Tangerang atau Surabaya. Dengan cara seperti itu lokasi untuk industri pun di arahkan. Begitu pula arus tenaga kerja akan diarahkan dengan sendirinya, sehingga tidak lagi terjadi arus urbanisasi ke satu tempat saja.

Banyak potensi yang sebenarnya belum tergali di tanah air. Salah satu di antaranya adalah air. Pada Pelita II belum ada satu pun karter yang digerakkan oleh air. Bahkan waktu itu ada orang Jepang yang kebetulan menjadi tenaga ahli, kaget ketika melihat air tidak digunakan. Padahal, air merupakan faktor paling menentukan dalam segala macam jenis industri. Bila tidak ada air, jelas pabrik manapun tidak akan bisa jalan.

Sejak Pelita III kita sudah memberikan perhatian yang cukup besar pada air, sebab lama-kelamaan fungsi air akan semakin penting. Kini sudah ada ratusan pengelolaan air tanah di ibukota-ibukota kecamatan. Dalam Pelita IV akan dikembangkan lagi sebanyak 1.800 buah agar masyarakat memperoleh lebih banyak air bersih. Perhatian yang lebih besar pada air ini telah melahirkan pendapat dari berbagai pihak agar air dikelola secara nasional, yaitu sebuah perusahaan air minum nasional. Hanya mungkin sulit untuk mewujudkan sebuah perusahaan air minum nasional, karena letak lumbung-lumbung air yang tersebar. Tapi apabila secara terpisah dan tersendiri mendirikan perusahaan air minum mungkin tidak terlalu sulit. Misalnya dari satu aliran air yang mensuplai air bersih pada 4 atau 5 kabupaten dibentuk satu perusahaan air minum. Bisa juga sebuah perusahaan air minum untuk mengelola sampai Cimanuk.

## Semua Pemakai Sarana Kota, Harus Bayar

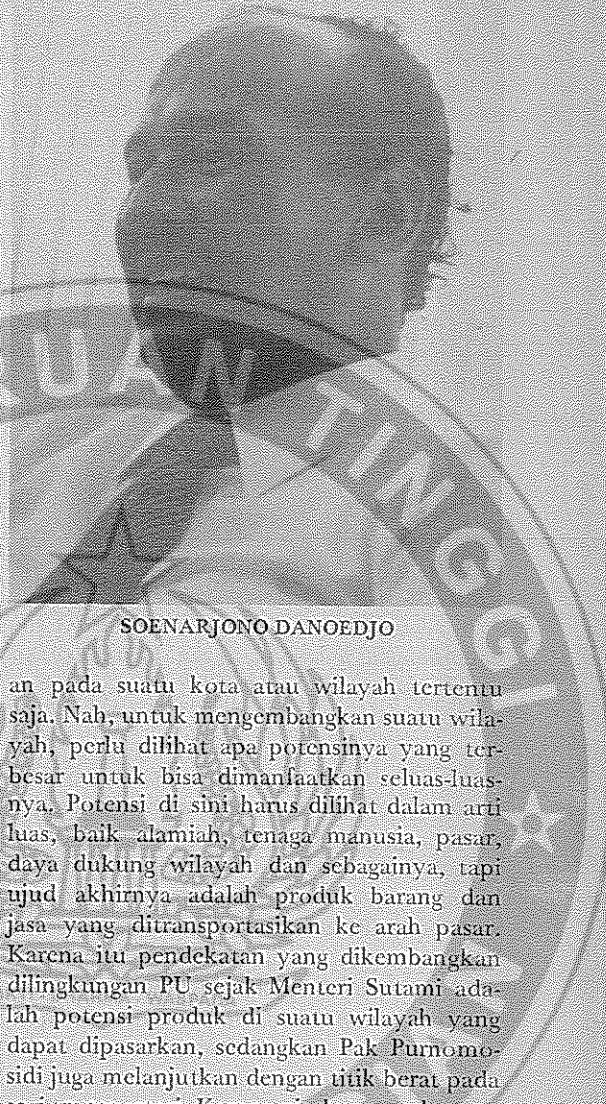
*Soenarjono Danoedjo*, Direktur Jendral Cipta Karya, Departemen PU.

Tanya: Bagaimana latar-belakangnya nanganan Departemen Pekerjaan Umum (PU) hingga urusan perkotaan masuk dalam pe-

**Jawab:** Departemen PU itu tugasnya menyediakan prasarana fisik, termasuk prasarana fisik bagi daerah perkotaan. Sebetulnya juga termasuk prasarana fisik perhubungan seperti pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya. Tapi karena nanti jadi terlalu besar, maka dibagi dua. Prasarana perhubungan laut dan udara, misalnya, masuk Departemen Perhubungan, tapi prasarana jalan darat tetap di PU. Itu sebabnya penyediaan prasarana fisik kota juga harus ditangani PU. Selain itu, prasarana yang dibangun PU itu ternyata merupakan ujung tombak pembangunan suatu daerah. Setiap kali kita bikin jalan raya, daerah sekitarnya berkembang. Kita bangun bendungan ataupun saluran irigasi, wilayah sekelilingnya kian berkembang. Karena peranan prasarana fisik ini demikian strategisnya bagi pengembangan suatu wilayah, maka di samping tugas penyediaan prasarana fisik, Departemen PU juga dititipi tugas mengatur tata-ruang nasional, daerah dan kota. Karena itu dalam Departemen PU ada Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah. Sebetulnya perkotaan merupakan masalah nasional yang berdimensi luas, tapi untuk jadi departemen tersendiri barangkali belum saatnya. Karena itu yang ditangani direktorat saya hanyalah aspek teknis dan tata ruangnya saja.

*T : Apakah karena itu PU jadi aktif dalam upaya mewujudkan sistem perwilayahan pembangunan? Apa sebenarnya kriteria yang digunakan untuk menetapkan suatu kota sebagai pusat pengembangan suatu wilayah, dan buat apa semua itu?*

**J :** Ya, karena bagaimanapun ruang nasional kita ini terbatas, dan harus bisa kita manfaatkan seefisien dan seefektif mungkin. Karenanya perlu kita bagi dalam beberapa tingkatan: ruang nasional, wilayah, daerah, kota dan desa. Setiap ruang harus bisa ditata agar kegiatan di dalamnya berlangsung secara efisien, yakni memudahkan interaksi dan integrasi berbagai sektor kegiatan di dalam wilayah bersangkutan. Kalau sudah jelas tata ruang dan sistem perwilayahannya, akan memberi pedoman yang jelas pula bagi investasi yang harus dilakukan oleh berbagai sektor lainnya. Juga bisa dihindari adanya penumpukan investasi dan sarana pembangun-



SOENARJONO DANOEDJO

an pada suatu kota atau wilayah tertentu saja. Nah, untuk mengembangkan suatu wilayah, perlu dilihat apa potensinya yang terbesar untuk bisa dimanfaatkan seluas-luasnya. Potensi di sini harus dilihat dalam arti luas, baik alamiah, tenaga manusia, pasar, daya dukung wilayah dan sebagainya, tapi ujung akhirnya adalah produk barang dan jasa yang ditransportasikan ke arah pasar. Karena itu pendekatan yang dikembangkan dilingkungan PU sejak Menteri Sutami adalah potensi produk di suatu wilayah yang dapat dipasarkan, sedangkan Pak Purnomosidi juga melanjutkan dengan titik berat pada segi transportasi. Karena ujung pengembangan suatu daerah pada akhirnya adalah produk yang dibawa ke arah pasar, jadi gerak arus barang dan jasa dari satu lokasi ke tempat yang lain. Maka struktur jaringan transportasi, dari rumahtangga ke pusat desa, kecamatan sampai tingkat wilayah dan nasional, ikut menentukan hirarki kota dan pengembangan suatu wilayah.

*T : Apakah hirarki kota itu bukannya ditentukan oleh fungsi kota?*

**J :** Fungsi kota itu kan sudah implisit dalam orde kota. Fungsi kota tidak bisa dipaksakan, harus berkembang dengan sendiri-

nya. Seperti di suatu tempat tiba-tiba terjadi pasar. Kalau kita yang merencanakan bikin pasar, belum tentu ada yang jual atau datang untuk beli. Begitu juga bisa terjadi suatu daerah mendadak jadi kota orde ketiga, tanpa ada yang merencanakan. Tentu ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, yang perlu kita kaji dan pelajari agar supaya perkembangannya tidak semrawut. Itulah yang kemudian melahirkan pemikiran untuk melakukan penataan ruang dengan membentuk sistem perwilayahan pembangunan (*regionalisasi*), dengan memperhatikan segi karakteristik masing-masing daerah/wilayah, maupun potensinya sebagaimana saya sebut tadi. Hal ini kadang-kadang masih menimbulkan kebingungan, karena penetapan batas-batas wilayah pembangunan itu tidak berdasarkan batas-batas administratif suatu daerah.

*T : Bagaimana sebenarnya mekanisme pengembangan wilayah-wilayah pembangunan itu dan penataan hirarki perkotaan yang berlaku sekarang ini?*

*J :* Misalnya begini. Kota Kupang di NTT pada tingkat sekarang walau dikembangkan seperti apapun akan tetap lebih berorientasi kepada kota orde satu Surabaya. Karena walaupun ibukota propinsi. Kupang itu sebetulnya termasuk kota orde ketiga. Namun orde kota itu selalu dinamis sifatnya. Ada suatu proses timbal balik, hingga jika makin berkembang, Kupang bisa cepat berubah menjadi kota orde dua nantinya. Demikian pula dengan konsep perwilayahan pembangunan kita, masih terus kita sempurnakan. Pada Pelita I dan II kita mengidentifikasi adanya 4 wilayah pembangunan utama (WPU), dengan masing-masing pusat pengembangannya di kota Medan, Jakarta, Surabaya dan Ujung Pandang. Dalam Pelita IV dan V sudah disepakati untuk memproyeksikan adanya 5 (lima) wilayah pembangunan utama (WPU) yaitu masing-masing dengan pusat pengembangannya di Medan, Jakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan *Ambon*. Kelak di kemudian hari, apabila sudah lebih berkembang semuanya, menurut studi yang kita lakukan, idealnya wilayah nusantara kita ini dibagi dalam 15 WPU. Dengan demikian kita bisa lebih terarah dalam melakukan investasi-

investasi pembangunan, sesuai dengan potensi dan trend yang berlaku.

*T : Tapi apakah penstrukturan seperti itu bukannya makin memperkuat kecenderungan terjadinya kota-kota metropolis dan megapolis di negeri kita?*

*J :* Sebenarnya tidak harus begitu, kalau saja kita bisa mendorong terjadinya lebih banyak pusat-pusat pengembangan. Karena itu perkembangan ke arah metropolis perlu dicegah, kalau perlu dengan secara artifisial menumbuhkan kota-kota lain. Usaha pencegahan ini penting, agar supaya perkembangan suatu kota jangan menjadi terlalu besar hingga melampaui beban yang mampu dipikulnya. Makin besar perkembangan sebuah kota, makin kurang mampu mengemban fungsi totalnya. Itulah perlunya sistem perwilayahan pembangunan, yaitu untuk lebih bisa mengatur dan mengarahkan investasi dan orientasi pembangunan. Misalnya, dulu Nusa Tenggara Barat maupun Timur keduanya berorientasi ke Surabaya, karena Ujung Pandang hanya melayani Sulawesi dan wilayah di bagian timur dan barat Ujung Pandang, bukan wilayah dibagian selatannya. Kini dengan adanya 5 WPU, orientasi pembangunan Nusa Tenggara dipecah menjadi dua. Hanya NTB yang berorientasi ke Surabaya, sedangkan NTT dan Timtim berorientasi ke Ujung Pandang. Dengan begitu beban Surabaya jadi tidak terlalu berat.

*T : Kalau begitu siapa sebenarnya yang menentukan wilayah pembangunan dan pusat-pusat pengembangannya itu. Kesannya seperti semua diatur dari atas.*

*J :* Yah, mustinya timbal balik. Pertama, kita adakan dulu studi *trend* perkembangan, dan ini penting sebagai dasar penyusunan konsep. Sebab, kalau kita hanya mengikuti keinginan daerah-daerah, kecenderungannya ialah setiap ibukota propinsi mau jadi kota orde satu. Tapi pada tingkat sekarang, hal itu kan tidak mungkin, tidak efisien. Ambil contoh Kupang tadi. Meski dipaksa bagaimanapun sekarang ini nyatanya masih bergantung pada Surabaya. Produksi dan potensinya yang ada kini belum bisa menunjang untuk berdiri sendiri. Tapi mungkin 20 ta-

huni lagi Kupang bisa jadi kota orde satu, siapa tahu? Contoh lain ialah kota Semarang, yang sulit untuk bisa menjadi pusat pengembangan WPU yang mampu berdiri sendiri. Sudah kita pelajari dan hitung-hitung potensinya, tetap saja masih berada dibawah pengaruh Jakarta. Berbeda dengan Palembang, yang sekalipun kini masuk orde dua dalam WPU yang berpusat di Jakarta, tapi nantinya akan berkembang menjadi kota orde satu. Sebaliknya, kendati Semarang nanti dihubungkan ke Jakarta dengan jalan Tol, akan makin membuatnya tergantung pada Jakarta dan tetap menjadi kota orde dua. Jadi pada tahap sekarang ini kita harus bisa membayangkan bagaimana kondisi akhir perkembangan wilayah itu kelak, agar supaya bisa ditempuh kebijakan yang mengarah ke sana. Itulah pentingnya studi *trend* tadi, yang telah kita lakukan dengan serius dalam 2-3 tahun terakhir ini. Sesudah itu kita bawa konsep perwilayahan tersebut untuk dimantapkan bersama dalam forum-forum konsultasi pembangunan tingkat regional dan nasional, di mana baik wakil-wakil sektor maupun wakil-wakil daerah semuanya ikut serta.

*T : Lantas bagaimana dengan usaha penataan kota-kota itu sendiri, apakah ada strategi tertentu? Kalau Jakarta dan kota-kota besar lainnya dikembangkan dengan suatu master plan, apakah kota-kota lebih kecil juga harus mengikuti pola yang sama? Bagaimana peranan Cipta Karya dalam hal ini?*

*J :* Upaya yang sekarang kita tempuh terus terang saja masih *demand oriented*. Apa yang terlihat dan terasa sebagai persoalan sekarang, ya itu yang kita coba atasi. Tapi Indonesia sebenarnya belum punya suatu strategi nasional pengembangan perkotaan. Itu sedang dicoba disusun oleh suatu tim kecil, NUDS. Karena selain perlu sistem perwilayahan pembangunan yang kini sudah ditetapkan dalam Struktur Pengembangan Wilayah Tingkat Nasional (SPWTN), kita juga perlu punya strategi nasional pengembangan kota. Kedua studi tentang sistem dan strategi tersebut masih perlu kita mantapkan untuk keperluan jangka panjang. Namun sementara itu belum ada, kita juga tak bisa tinggal diam. Sambil bikin studi kita juga harus jalan terus. Sepanjang menyangkut pe-

rencanaan *urban area*, memang Cipta Karya yang bertanggung jawab. *Urban area* itu bisa melampaui batas-batas administratif kotamadya. Karena itu perencanaan daerah perkotaan (*urban plan*) kita lakukan, sedangkan fungsi perencanaan kotanya sendiri ada pada pemerintah daerah/kotamadya. Berdasarkan *urban planning* yang ada, Cipta Karya memberi bimbingan teknis kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana induk (*master plan*) kota yang bersangkutan. Kemudian Walikota menyusun lagi *detail plan* kota tersebut. Dewasa ini Cipta Karya sudah menyusun lebih dari 100 buah *urban plan* bagi berbagai daerah perkotaan di Indonesia.

*T : Dalam membuat rencana induk kota-kota itu, faktor apa yang paling penting untuk diperhitungkan?*

*J :* Faktor laju dan jumlah pertambahan penduduk yang bermukim di daerah perkotaan. Dasar kita membangun kan untuk penduduk. Dalam lima tahun mendatang akan terjadi kenaikan jumlah penduduk yang besar sekali, sekitar 18 juta orang, dimana 10,5 juta (60 persen) diantaranya akan membantiri 5 kota besar yang ada, bahkan konsentrasi penduduk terbesar adalah pada tiga kota besar di Jawa: Jakarta, Surabaya dan Bandung. Jadi perlu perencanaan yang lebih cermat, jangan sampai tumbuh terlalu tinggi melampaui daya tampung kota itu sendiri. Bagaimanapun harus tetap ada daerah jalur hijau di tengah maupun pinggiran kota, agar sistem tata-air tanah dan lingkungan kota jangan rusak, misalnya.

*T : Tapi mengapa faktor manusia itu justru belum dijadikan orientasi perencanaan dan pengembangan kota? Apakah arus barang dan jasa lebih penting dari mobilitas penduduk, misalnya. Dan mengapa pembangunan prasarana dan pelayanan fasilitas kota tidak diarahkan kepada mayoritas penduduk kota yang kebetulan berpenghasilan rendah dan hidup dari sektor informal?*

*J :* Bukan begitu. Coba kita lihat dulu kenyataannya, mengapa orang bergerak pindah ke Jakarta ataupun ke Surabaya. Faktor dan motivasinya bisa bermacam-macam, tapi akhirnya ujud yang diperlukan manusia di



kota 'kan barang dan jasa itu. Hingga arus gerak barang dan jasa itu perlu dijamin dalam pola transportasi dan sarana perkotaan agar sampai ke pasar dan konsumen. Karena dari sejak bahan mentah hingga produk barang jadi sampai ke pemasaran 'kan ada banyak proses-proses yang terjadi. Proses yang bertingkat, melalui berbagai orde kota. Tiap proses membutuhkan tenaga kerja manusia, untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan barang tersebut. Orang yang memproses barang tersebut juga membutuhkan pelayanan orang lain. Misalnya jasa bank, pelayanan pemerintah, asuransi, ataupun pelayanan rumah tangga, rumah makan, dan sebagainya. Suatu kota yang tidak menunjang proses peningkatan barang dan jasa, tentu tidak akan berkembang. Perpindahan penduduk memang karena berbagai faktor, tapi juga terutama karena mereka menginginkan fasilitas dan kondisi hidup yang lebih layak di kota. Karena itu pembangunan sarana kota harus bisa memenuhi tuntutan tersebut. Tapi sayangnya, selama ini kita masih selalu berkejaran dengan *demand*, tuntutan-runtutan yang saling mendesak, sementara kemampuan kita masih saja terbatas. Jadi selalu ada saja tuntutan mendesak yang belum terpenuhi.

*T: Benar, memang tidak mungkin semua tuntutan bisa dipenuhi sekaligus. Tapi mengapa kebutuhan dan tuntutan kelompok penduduk yang tinggal di kampung-kampung miskin—yang nota bene merupakan mayoritas penduduk kota justru harus dipenuhi paling belakang, tak pernah dapat prioritas pertama?*

*J: Begini masalahnya. Seperti saya jelaskan tadi, banyak sekali berbagai tuntutan yang didesakkan pada kita, sedangkan kemampuan ini begitu terbatas. Selain itu, sesuai dengan fungsi dan orde kota, sebenarnya sudah ada suatu sistem pembagian kerja fungsional pada masing-masing pusat pengembangan itu, dimana prinsip dasarnya ialah saling melayani. Pelayanan itu juga mengikuti pola proses pembuatan barang maupun arus barang dan jasa ke pemasaran dan konsumen seperti dijelaskan tadi. Dalam arus komoditi itu ada hirarki organisasi masyarakat yang pokok yang dilayani, kemudian inipun butuh pelayanan, dilayani lagi,*

*begitu seterusnya. Jadi bahwa tukang becak, tukang sayur yang datang ke rumah-rumah, memang kita perlukan dalam rangka hirarki pelayanan kebutuhan kota itu. Sebab kalau tidak ada mereka, bayangkan betapa macetnya jalan-jalan raya karena semua orang musti naik mobil pergi ke *shopping centre*. Masalahnya bagaimana si pengelola kotamadya bisa melayani sejauh mungkin seluruh masyarakat warga kota itu. Karena prinsipnya semua warga kota punya hak untuk dilayani. Tapi tugas kotamadya tidak hanya melayani semata-mata, melainkan juga harus bisa memperoleh pendapatan (*revenue*) untuk mampu melayani warganya. Hal ini yang akhirnya membawa kepada keadaan dimana pelayanan diberikan kepada yang mampu membayar. Yang menikmati fasilitas kota terbaik tentunya mereka yang sanggup membayarnya dengan harga tinggi, sedangkan yang kurang mampu harus sedia menerima fasilitas seadanya. Itu sebabnya fasilitas dan nilai pelayanan kota jadi berbeda-beda. Daerah yang sudah maju justru butuh pelayanan paling tinggi. Daerah Menteng di DKI Jakarta misalnya, harga tanahnya tinggi sekali, karena di sana terdapat pelayanan kota yang lengkap dan kelas satu. Sedangkan mereka yang tinggal di kampung pinggiran kota dan penghasilannya rendah, pelayanan yang diperoleh hanya kelas ke-7 barangkali. Ini mungkin proses alami yang sulit dihindari. Yang penting para perencana kota itu mampu mengusahakan agar setiap warga mempunyai hak dan kesempatan untuk memperoleh pelayanan kota, asal bersedia membayar untuk itu. Perbedaan pelayanan hanya dalam sistem tarif: yang mampu bayar tinggi, yang kurang mampu bayar rendah. Namun prinsipnya tetap bahwa semua musti ikut membayar jasa pelayanan kota. Karena untuk menyediakan pelayanan itu diperlukan investasi modal dan biaya pengelolaan yang cukup besar dan tak mungkin dipikul pemerintah kota saja.*

*T: Itu bisa dipahami, kalau kita memang musti ikut hukum ekonomi tulen. Namun pembangunan prasarana kota apakah harus selalu mengikuti pola investasi dan struktur ekonomi sektor moderen dan kemudian masyarakat selebihnya harus sekedar mengikuti pola mereka?*

**J :** Struktur organisasi dan perekonomian kita kan sudah demikian. Kita tak mungkin mendahului untuk mengubahnya. Sedangkan untuk pelayanan sarana kota itu perlu dana dan waktu. Dari segi penyediaan air bersih saja, baru bisa diterima sekitar 30 persen dari penduduk kota, walaupun kapasitas terpasangnya sudah mampu melayani 60 persen penduduk atau sekitar satu juta penduduk Jakarta. Ini karena jaringan yang ada sekarang belum memungkinkan. Sekarang memang mubazir. Hanya bukankah lebih baik ada kapasitas berlebih daripada jaringan berlebih. Kalau jaringan yang berlebih dan kepada konsumen air hanya dikirim angin, bukanlah lebih menyakitkan mereka. Kalau ini yang terjadi orang akan bisa mengatakan kepanjangan PAM bukan Perusahaan Air Minum, tetapi Perusahaan Angin Masuk.

**T :** Tapi bukankah konsumen sudah terbiasa menerima hal-hal seperti itu, tidak seperti di negara-negara maju misalnya. Sebagai contoh listrik yang sering padam hampir tidak menjadi persoalan bagi banyak orang?

**J :** Listrik itu sering padam justru setelah mempergunakan sistem *interconnection* untuk seluruh pulau Jawa. Mungkin belum terbiasa mengendalikannya dari pusat pengendalian. Namun yang jelas pelayanan-pelayanan yang diberikan kota di Indonesia kepada penduduknya baru sekitar 10 persen. Biaya untuk memberikan fasilitas pelayanan itu cukup besar. Mungkin kita membutuhkan *ducting system*, yaitu saluran air limbah dalam ukuran besar dan ditanam di bawah tanah. Di kota-kota benua Eropa, atau di negara-negara maju seperti Amerika Serikat atau Jepang, saluran air ini dipergu-

nakan juga sebagai jaringan pipa air minum, listrik, telepon, gas dan sebagainya. Nah ini tidak kita miliki di daerah perkotaan. Akibatnya, pemberian pelayanan menjadi mahal karena semua dinas yang memberikan pelayanan membuat salurannya sendiri-sendiri, listrik dengan saluran sendiri, air begitu, pun gas dan telepon. *Ducting system* ini akan segera memecahkan masalah. Tidak perlu lubang galian sebuah instansi bersilang dengan lubang galian dari instansi lain. Mereka dapat mempergunakan *ducting* yang ada, sebab hampir semua pelayanan perkotaan yang sejenis bisa didistribusikan melalui *ducting* ini.

**T :** Lantas dengan fasilitas-fasilitas pelayanan seperti itu, siapa dan berapa gelintir yang dapat menikmatinya. Bukankah hanya orang-orang yang berpendapatan tinggi?

**J :** Semua warga kota dapat menikmatinya asalkan bayar. Misalnya, warga kota yang dapat air dari waduk Jatiluhur diharuskan membayar Rp. 10,- per meter kubiknya, sebab air itupun mengalir disepanjang kanal sejauh 150 kilometer, sehingga biaya pembuatan kanal itupun diambil dari para pemakai air. Masyarakat pemakai juga harus membayar pembangunan 6 buah waduk untuk membantu Jatiluhur. Salah satu waduk ini dibangun di Depok, dan berfungsi sebagai pengganti Jatiluhur bila dikeringkan untuk diperbaiki. Atau digunakan pada waktu musim kemarau untuk irigasi dan sekaligus untuk kebutuhan air minum Jakarta. Namun sebagai penampung air bersih waduk Depok hanya untuk memenuhi kebutuhan Jakarta selama 2 atau 3 minggu saja.

## Tak Sulit Cari Dana, Jika Rakyat Nikmati Hasilnya

*Daeng Patomppo*, bekas Walikota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.

**Tanya:** Anda termasuk walikota yang dinilai berhasil dalam mengembangkan dan membangun kota. Apakah sebenarnya yang Anda tempuh dalam mengikutsertakan ma-

syarakat dalam pembangunan Ujung Pandang ini?

**Jawab:** Modal utama bagi saya, rakyat

Ujung Pandang. Kepada mereka saya berikan sarana yang baik dan cukup seperti sekolah untuk anak-anak mereka dan sebagainya. Setelah melihat bahwa pemerintah daerah memberikan sarana yang cukup, maka penarikan dana dari para pemakai jasa atau fasilitas kota ini dapat dengan mudah dilakukan. Bila sarana tidak cukup, mungkin sulit bagi pemerintah daerah untuk menarik pajak. Rakyat Ujung Pandang membutuhkan hasil kerja yang nyata. Mereka harus melihat satu jenis pekerjaan yang berhasil memperbaiki hidup mereka. Untuk itu yang saya lakukan adalah memperbanyak pembangunan sektoral. Dalam pembangunan ini dilakukan pengontrolan yang baik agar tidak terjadi kemacetan. Tapi sebelumnya memang sudah saya pahami, bahwa apabila kita memberikan yang baik bagi mereka, mereka akan segera memberikan partisipasinya.



DAENG PATOMPPPO

*T: Tapi sampai di mana pengaruh faktor keturunan seseorang melihat Anda sebagai putera daerah yang berperan di antara mereka, sebab biasanya masyarakat mengaitkannya dengan faktor keluarga?*

*J: Saya memang keturunan raja. Tetapi, sifat feodal tidak ada pada saya. Pengaruh keluarga tidak ada. Timbulnya partisipasi rakyat selama saya menjadi walikota di Ujung Pandang adalah karena wibawa. Saya membangun pemerintah daerah yang berwibawa dan keteladanan yang bekerja untuk rakyatnya. Pengaruh ini yang besar karena, pada waktu saya menjadi walikota, suhu politik masih tinggi. Saya sering mendapat tentangan dari banyak pihak ketika mengambil suatu kebijaksanaan dalam usaha mengumpulkan dana dari saku masyarakat.*

*T: Kendati Anda keturunan raja di daerah kekuasaan Anda, nampaknya bukan menjadi jaminan untuk dapat menggerakkan massa agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Banyak contoh yang memperlihatkan itu. Saya melihat, hal itu mungkin juga karena kebetulan saat Anda menjadi penguasa warga Ujung Pandang sedang gandrung membangun?*

*J: Anda jangan lupa, masyarakat awam Ujung Pandang itu rasional. Rasionalitas*

mereka terlalu tinggi sehingga bisa lahir suatu persamaan pemikiran antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Dari kekompakan itu berhasil pembangunan dilaksanakan. Hasilnya dapat dinikmati sampai pada masyarakat kecil. Walaupun begitu memang agak sulit membangkitkan semangat membangun pada masyarakat Ujung Pandang,

karena sistem multi partai yang dipergunakan waktu saya menjadi Walikota menimbulkan banyak hambatan. Ibarat dalam kemiliteran, masa itu saya berjalan untuk menyapu ranjau-ranjau. Membersihkan jalan untuk pembangunan.

*T: Begitu Anda diangkat menjadi walikota, langkah-langkah awal apakah yang Anda ambil?*

*J: Saudara perlu tahu, ketika diangkat menjadi walikota saya baru berusia 34 tahun. Dalam usia muda itu langkah pertama yang saya ambil adalah memperkenalkan Orde Baru kepada mereka. Apa itu kepemimpinan Orde Baru dan apa arti kepemimpinan Pancasila. Juga saya jelaskan apa arti kepemimpinan Proklamasi. Itu langkah pertama yang saya ambil untuk menggalakkan*

keinginan membangun mereka. Bukan pidato. Tetapi kerja. Saya jelaskan, kepemimpinan Pancasila adalah pemerataan kehidupan. Jadi saya tunjukkan kepemimpinan Pancasila kepada masyarakat Ujung Pandang. Juga kepemimpinan proklamasi yakni tentang bagaimana hubungan masyarakat yang adil dan makmur. Lalu kepemimpinan Orde Baru yang bekerja untuk orang lain. Itu!

*T: Bagaimana hasil langkah-langkah awal itu dalam membina orang-orang di bawah Anda?*

J: Saya laksanakan disiplin ketat. Mereka saya rangsang dengan jaminan sosial.

*T: Dari mana Anda ambil dana-dana untuk jaminan sosial itu?*

J: Dari pendapatan daerah. Sesuai peraturan, di mana bila pendapatan daerah berhasil ditingkatkan orang yang mampu meningkatkannya berhak memperoleh bagian 10 persen dari pendapatan itu. Ini dibagi sama rata kepada seluruh pegawai, sehingga tidak ada yang duduk di tempat basah, dan tidak ada yang pendapatannya menonjol.

*T: Apakah sebenarnya dana yang diperoleh pemerintah daerah dari masyarakat cukup besar bagi pembangunan?*

J: Cukup! Saya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan meningkat tinggi. Meningkatkan 200 persen. Tiap tahun meningkat. Waktu itu pendapatan yang terbesar dari pajak tontonan. Namun sekarang pajak tontonan bukan lagi pendapatan terbesar, karena bioskop dipukul oleh video. Dari pendapatan itu saya bangun jalan dua jalur sepanjang 27 kilometer. Itu yang menjadi *ring road* sekarang.

Masyarakat pada masa itu menjadi rajin membayar pajak, karena mereka melihat ada peningkatan kegiatan pembangunan di segala bidang. Waktu itu saya berhasil pula membangun pemancar televisi hitam putih. Ini merupakan loncatan 25 tahun ke depan bagi

Ujung Pandang. Bagaimana pemancar televisi hitam putih itu ditingkatkan menjadi pemancar yang berwarna adalah urusan pengganti saya. Saya sudah memperjuangkannya sampai ada. Itu baru direalisasikan pusat sebagai TVRI cabang Ujung Pandang pada tahun 1978. Tahun 1966, saya sudah membuat rumah yang merupakan "Perumnas" daerah. Itu berarti saya sudah bertindak lebih jauh dari pada Pemerintah Pusat dalam memikirkan pembangunan perumahan murah.

*T: Untuk perumahan ini Anda menggunakan dana dari mana?*

J: Saya juga tidak tahu dari mana. Sebab, *lotto* saya buka tahun 1970. Tapi, pendapatan dari *lotto* bukan yang utama bagi Ujung Pandang, walaupun tidak dapat dikatakan kecil. Sebagian rakyat Ujung Pandang menentang *lotto*. Lantas kepada mereka saya buktikan bahwa hasil dari *lotto* itu saya gunakan untuk pembangunan. Itu menyebabkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak memberikan reaksi menentang lagi setelah itu. Setelah ada Inpres, *lotto* tidak lagi saya perlukan. Sejak itu saya membangun dengan dana sebesar 90 persen dari pendapatan daerah. Sebelum tahun 1970, biaya ini 10 persen saya dapat dari Pemerintah Pusat. Baru setelah tahun 1970, untuk pembangunan di APBN-kan. Setelah itu *lotto* hanya sebagai pelengkap. Pendapatan daerah cukup untuk membayar gaji, biaya rutin dan membangun dengan APBD tersebut.

*T: Apakah dalam pengembangan kota ini Anda sudah mempunyai master plan?*

J: Ada! Untuk 50 tahun. Cuma saya tidak tahu, kenapa *master plan* itu tidak dipergunakan oleh pengganti saya.

*T: Pada waktu Anda menjadi walikota, sebenarnya berapa kira-kira perbandingan biaya rutin dan biaya pembangunan yang Anda gunakan?*

J: 60 : 40.